

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA
KREMBANGAN**

**LAPORAN KINERJA (LAKIN)
TAHUN 2024**



**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA
KREMBANGAN**

PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Krembangan dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Surabaya Krembangan. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Rencana Strategis ini kemudian menjadi acuan penetapan Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I.

Dalam menjalankan Rencana Strategis tersebut di atas seluruh aparatur di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I telah disatukan dalam visi yang berbunyi sebagai berikut:

“Menjadi Kantor Wilayah Penghimpunan Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”

Dengan mengacu kepada Visi Direktorat Jenderal Pajak, maka misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I adalah:

“Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- 1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;*
- 2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;*
- 3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan*
- 4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.”*

Dengan menyatakan visi dan misi tersebut terkandung maksud agar seluruh aparat di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I sepatutnya, betapa beratnya tugas yang harus dilaksanakan akan dijadikan tantangan untuk meraih keberhasilan yang semakin baik dari hari ke hari.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIN tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran serta bimbingan sangat diharapkan agar ditahun-tahun yang akan datang lebih baik.

Surabaya, 29 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Setiadi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
TARGET KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	7
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	7
B. Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi.....	11
1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	11
1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	11
1b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	11
2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi.....	12
2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).....	12
2b-CP Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.....	12
3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi	12
3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).....	12
4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif	13
4a-CP Persentase Perubahan Perilaku Laport Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan.....	13
4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan.....	13
5. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa.....	13
5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	13
6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif.....	15
6a-CP Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (P4DK).....	15
6b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan.....	15
6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu ..	15
7. Penegakan Hukum yang Efektif	16
7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian.....	16
7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan	16
7c-N Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	17
8. Data dan Informasi yang Berkualitas.....	17
8a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	17
8b-CP Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP.....	17

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif.....	18
9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM....	18
9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit.....	18
9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko 18	
10. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.....	18
10a-N Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	19
BAB IV PENUTUP.....	20
LAMPIRAN.....	21
Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Surabaya Krembangan	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024	5
Tabel 2 Rincian Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024.....	7
Tabel 3 Rincian Realisasi Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar.....	13
Tabel 4 Penghitungan Realisasi PPM Strategis	14
Tabel 5 Penghitungan Realisasi PKM Strategis	14
Tabel 6 Penghitungan Realisasi Efektivitas Penagihan.....	16
Tabel 7 Indikator Pelaksanaan Anggaran.....	19

BAB I PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan terletak di Jalan Indrapura No.5 Surabaya. Saat ini KPP Pratama Surabaya Krembangan membawahi Kelurahan yang berada di Kecamatan Krembangan yang terdiri dari:

- Kelurahan Dupak
- Kelurahan Krembangan Selatan
- Kelurahan Morokrembangan
- Kelurahan Perak Barat
- Kelurahan Kemayoran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal struktur organisasi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Surabaya Krembangan terdiri dari:

10 (sepuluh) Seksi dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI;
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam upaya mencapai target, KPP Pratama Surabaya Krembangan tidak hanya memiliki potensi yang menguntungkan, akan tetapi juga menghadapi berbagai permasalahan yang menjadi tantangan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Kesalahan pada sistem yang menyebabkan error aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan.
2. Masih terdapat data monitoring IKU yang menjadi bahan acuan dalam rapat monitoring dan evaluasi yang masih tidak update dan memerlukan waktu terlalu lama untuk update.
3. Kurangnya data untuk penyusunan DSE sehingga petugas hanya menyusun DSE dari data KPDL, serta kurangnya potensi di wilayah padat penduduk yang menjadikan pelaksanaan KPDL kurang efektif.
4. Pengiriman SP2DK terhambat yang disebabkan oleh kelalaian ekspedisi dalam menyampaikan surat.
5. DJP tidak memiliki akses data kependudukan online sehingga penerbitan NPWP secara jabatan terkendala karena nama dan alamat Wajib Pajak yang tidak valid.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

TARGET KINERJA

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi DJP serta mendukung pencapaian *destination statement* DJP 2020 - 2024, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I menetapkan 10 sasaran strategis. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 1 Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				101,32
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			101,32
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,12%	100,12
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	115,44	102,96
Customer Perspective				100,59
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			101,06
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,12%	100,12
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	102,35%	102,35
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,12
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,12%	100,12
Internal Process Perspective				115,81
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115,44
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100,00%	110,88%	110,88
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,57%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			115,64

6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	110,42%	110,42
7	Penegakan hukum yang efektif			112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	122,87%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	155,96%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			115,29
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	61,50%	111,82
Learning & Growth Perspective				117,64
9	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif			115,28
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	100,00%	117,07%	117,07
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	100,00	117,65
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				108,88

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Surabaya Krembangan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi : KPP Pratama Surabaya Krembangan

Tahun Anggaran : 2024

Tabel 2 Rincian Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET		REALISASI		GAP
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak _____ x 100%	100,00%	1,324,052,491,000	100,12%	1,325,621,907,349	100,12%
		Target penerimaan pajak		1,324,052,491,000		1,325,621,907,349	
1b-CP	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)	100,00%	1.252.213.412.000	102,96	1.253.696.960.460	2,96
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	100,00%	1.252.213.412.000	100,00%	1.252.213.412.000	0,00%
		Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM		_____ x 100%		_____	
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	(1,2 x jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT) + jumlah SPT Tahun Pajak 2023 selain yang	100,00%		102,35%		2,35%

		disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT)					
		$\frac{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$					
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	100,00%	71.839.079.000	100,12%	71.924.946.889	0,12%
		$\frac{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$		71.839.079.000		71.839.079.000	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}	74,00%		88,80%		14,80%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Indeks Hasil Survei	5,00%		110,88%		105,88%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))	90,00%		118%		27,57%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))	100,00%		120,00%		N/A
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	(Capaian pemanfaatan data STP) + (Capaian pemanfaatan Data Matching)	100,00%		120,00%		20,00%
		2					

6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	100,00%		110,42%		10,42%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)	100,00%		122,87%		22,87%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)	75,00%		155,96%		80,96%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100$	100,00%		100,00%		0,00%
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	$\frac{\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan}}{2} \times 100\%$	100,00%		120,00%		20,00%

8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	[70% X ((Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan/Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan X 40%) + (Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap/Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan X 60%))] + [30% X ((Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan/Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan X 40%) + (Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap/Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan X 60%))]	55,00%		61,50%		6,50%
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)	100,00		117,07		17,07
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi	8500,00%		N/A		N/A
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko	90,00		100,00		10,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Triwulan1 s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100) Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)	100,00		120,00		20,00

B. Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Krembangan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 terealisasi sebesar 100.12% dari 100,00% target yang ditetapkan. Berdasarkan data pada aplikasi Mandor, penerimaan mencapai Rp1.325.621.907.349 dari target perubahan sebesar Rp1.324.052.491.000. Atas capaian ini, Penerimaan KPP Pratama Surabaya Krembangan mendapat indikator hijau.

1b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Capaian IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 telah mencapai nilai 102,96 dari nilai 100 yang menjadi target. Dari sisi komponen pertumbuhan penerimaan pajak bruto, tercapai sebesar 105,92% pada tahun 2024. Sementara itu, deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 100,00%. Atas capaian ini, realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas mendapat indikator hijau dan bernilai positif.

2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan PPM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (hingga tanggal cut off-nya) berdasarkan data dari Aplikasi Mandor adalah sebesar Rp 1.253.696.960.460 dari target Rp 1.252.213.412.000 sehingga realisasi IKU ini adalah sebesar 100,12% dari 100% target yang ditetapkan atau tercapai sebesar 100,12%. Atas capaian ini, penerimaan PKM KPP Pratama Surabaya Krembangan mendapat indikator hijau.

2b-CP Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, IKU ini telah terealisasi sebesar 102,35% dari target 100,00%. IKU ini merupakan gabungan dari realisasi kepatuhan SPT PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis serta Kewilayahan. Realisasi SPT Wajib Pajak Strategis adalah sebesar 116,83%, terdiri dari 444 SPT tepat lapor dan 49 SPT terlambat lapor. Sementara itu, realisasi SPT dari WP Kewilayahan adalah sebesar 101,66%, terdiri dari 6.692 SPT tepat lapor dan 782 SPT terlambat lapor. Capaian total dari IKU ini adalah 102,35%. Atas capaian ini, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Krembangan mendapat indikator hijau.

3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan data dari Aplikasi Mandor adalah sebesar Rp 71.924.946.889 dari penyesuaian target sebesar Rp 71.839.079.000, atau senilai 100,12% dari target 100%. Atas capaian ini, penerimaan PKM KPP Pratama Surabaya Krembangan mendapat indikator hijau

4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

4a-CP Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, target yang ditetapkan untuk Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan adalah sebesar 74,00%, sementara itu realisasinya adalah sebesar 88,80%. Sehingga, capaian IKU s.d. Triwulan IV sebesar 120.00% atau mendapat indikator hijau. Rincian realisasi dapat disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 3 Rincian Realisasi Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar

Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
		Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100.00 %	18.50 %	35.45 %	28.12 %	113.64 %	42.18 %	88.80 %	23.13 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 memiliki target akumulatif sebesar 85%. Realisasi IKU ini diambil dari hasil survei yang diisikan WP atas dua komponen, yaitu efektivitas penyuluhan dan pelayanan. Sampai dengan rapat dilaksanakan, belum terdapat update pemantauan hasil survei yang dilakukan pada link <https://s.id/SurveiDJPTriwulanan>. Sehingga, realisasi yang digunakan masih s.d. Triwulan III yaitu sebesar 19.08%.

5. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 terealisasi sebesar 117,85% dari 90% target yang ditetapkan di Triwulan IV Tahun 2024. Capaian IKU ini adalah sebesar 120,00%. Capaian IKU tersebut diperoleh dari jumlah total realisasi PPM Strategis dan PPM Kewilayahan. Realisasi PPM Strategis terdiri dari realisasi atas Surat Tagihan Pajak (STP), data perpajakan, dan dinamisasi PPh Pasal 25. Sementara itu realisasi PPM Kewilayahan terdiri dari realisasi realisasi atas STP, data perpajakan, dan penambahan Wajib Pajak (WP). Atas capaian ini, pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Surabaya Krembangan mendapat

indikator hijau. Rincian realisasi tersebut yang berdasarkan pada data aplikasi Mandor dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Realisasi PPM Strategis

Tabel 4 Penghitungan Realisasi PPM Strategis

Keterangan	Target	Realisasi	Nilai	Bobot	Realisasi IKU
STP	1.251	1.584	120,00%	40%	48,00%
Data Perpajakan					
a. Kuantitas	94	110	117,02%		
b. Kualitas	94	147	156,38%		
Total			120,00%	30%	36,00%
Dinamisasi PPh Pasal 25					
a. Kuantitas	22	22	100,00%		
b. Kualitas	16	17	106,25%		
Total			103,75%	30%	31,13%
Total				100%	115,13%

Realisasi PPM Strategis Tahun 2024 adalah sebesar 115,13% dari *trajectory* sebesar 90%, sehingga capaian PPM Strategis tahun 2024 adalah sebesar 115,13%.

b. Realisasi PPM Kewilayahan

Tabel 5 Penghitungan Realisasi PKM Strategis

Keterangan	Target	Realisasi	Nilai	Hasil	Bobot	Realisasi IKU
STP	1.436	2.284	120,00%		30%	36,00%
Data Perpajakan						
a. Kuantitas	44	57	120,00%			
b. Kualitas	44	94	213,64%			
Total			120,00%		30%	36,00%
Penambahan WP						
a. Kuantitas	60	85,87	143,12%	90,00%		
b. Kualitas	24	56,00	233,33%	58,33%		
Total				148,33%	40%	48,00%
Total					100%	120,00%

Realisasi PPM Kewilayahan Tahun 2024 adalah sebesar 120,00% dari target sebesar 90% dari *trajectory* sebesar 90%, sehingga capaian PPM Kewilayahan adalah sebesar 120,00%.

Realisasi IKU PPM dihitung berdasarkan 50% dari realisasi PPM Strategis ditambah dengan 50% realisasi PPM Kewilayahan. Berdasarkan data tersebut diperoleh realisasi sebesar 120,00% dari *trajectory* sebesar 90%, sehingga diperoleh hasil capaian IKU PPM tahun 2024 sebesar 120,00%.

6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

6a-CP Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (P4DK)

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 terealisasi sebesar 120.00% dari 100% target yang ditetapkan. Realisasi ini merupakan rata – rata dari IKU P4DK Strategis yang mencapai 120.00% dan P4DK Kewilayahan yang mencapai 120.00%. Atas capaian ini, IKU P4DK KPP Pratama Surabaya Krembangan mendapat indikator hijau. Komponen yang diperhitungkan dalam IKU P4DK tahun 2024 adalah:

- a. Pada IKU P4DK Strategis, komponen yang diperhitungkan yaitu:
 - Komponen Penelitian, yang terdiri dari Laporan Hasil Penelitian (LHPt)
 - Komponen Tindak Lanjut, yang terdiri dari Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Outstanding.
- b. Pada IKU P4DK Kewilayahan, komponen yang diperhitungkan yaitu:
 - Komponen Kuantitas, yang terdiri dari LHP2DK DPP dan LHP2DK SP2DK Outstanding.
 - Komponen Kualitas, yang terdiri dari kualitas LHP2DK.

6b-N Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan

Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 tercapai sebesar 120.00%. IKU ini merupakan hasil dari rata-rata capaian IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan oleh *Account Representative* di KPP masing-masing. Komponen yang digunakan dalam penghitungan IKU ini yakni rata-rata capaian pemanfaatan data STP dan capaian pemanfaatan data *matching*.

6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

IKU ini hingga Triwulan IV Tahun 2024 terealisasi sebesar 103,17% dari 100% target yang ditetapkan. IKU ini terdiri dari tiga komponen, yaitu 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan dan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Komponen kualitas pelaksanaan komite kepatuhan yang diambil datanya dari Rapor Kinerja bernilai baik atau sebesar 85.43%. Kepala Kantor menghimbau agar kinerja ini dapat ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga bernilai maksimal. Atas capaian ini, KPP Pratama Surabaya Krembangan mendapat indikator hijau.

7. Penegakan Hukum yang Efektif

7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

IKU ini sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 122,87% dari target 100,00%. IKU ini merupakan IKU baru yang saat ini komponennya tidak hanya terdiri dari pemeriksaan namun juga penilaian. Formula penghitungan IKU ini yakni 60% capaian komponen tingkat efektivitas pemeriksaan dengan capaian sebesar 127.16% ditambah 40% capaian komponen tingkat efektivitas penilaian dengan capaian sebesar 116.44%. Sehingga capaian IKU ini sebesar 120.00% (berindikator hijau).

7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 terealisasi sebesar 155,96% dari 75,00% target yang ditetapkan. Rincian perolehan realisasi IKU tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 6 Penghitungan Realisasi Efektivitas Penagihan

Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Variabel IKU
Variabel tindakan penagihan	113.95%	50,00%	56.97%
Variabel tindak lanjut DSPC	120.00%	30,00%	24.00%
Variabel pencairan DSPC	120.00%	20,00%	36.00%
Total			155.96%

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, IKU ini telah terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024. IKU ini memiliki beberapa ketentuan yaitu, Usul Kegiatan Pengawasan dan/atau Pemeriksaan, Usul disampaikan sesuai format Lembar Usul dan diadakan Case Building, dan Usul dapat atas WP yang terdaftar di dalam maupun luar wilayah kerja KPP. Target IKU ini adalah 1 (satu) Wajib Pajak yang disetujui ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Realisasi dapat diakui saat sudah dilakukan penelaahan usulan buper yang dibuktikan dengan BA Penelaahan. Atas capaian ini, IKU penyampaian usul pemeriksaan buper KPP Pratama Surabaya Krembangan mendapat indikator hijau.

8. Data dan Informasi yang Berkualitas

8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Pada tahun 2024, IKU ini memiliki realisasi sebesar 120.00% dari 100.00% target yang ditetapkan. IKU ini terdiri dari dua komponen yaitu Realisasi Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan (KPD). Berdasarkan monitoring yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, realisasi penyelesaian laporan pengamatan KPP Pratama Surabaya Krembangan sebesar 165%. Terkait dengan pengriiman Laporan Pengamatan agar memperhatikan tanggal jatuh tempo pengiriman, yaitu kurang dari 3 bulan sejak Surat Perintah, agar dapat memperoleh poin 1,1 per laporan. Atas capaian ini, KPP Pratama Surabaya Krembangan mendapat indikator hijau.

8b-CP Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan Triwulan IV berdasarkan data dari Kanwil adalah sebesar 55,00% dari target sebesar 55.00% yang telah ditetapkan. Sehingga, capaian IKU tersebut sebesar 100.00% atau mendapat indikator hijau.

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

IKU ini telah terealisasi 113,50% dari 100% target yang ditetapkan. IKU ini dihitung berdasarkan 2 komponen, yaitu Komponen 1 (Kualitas Kompetensi) dan Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM). Komponen 1 terdiri dari tiga aspek yaitu,

1. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya.
2. Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya.
3. Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Sementara itu, komponen 2 terdiri dari:

1. pelaksanaan kegiatan pada empat bidang bintal (minimal satu kegiatan pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan)
2. kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)
3. kepatuhan pelaporan (kesesuaian pelaporan kepada Unit Pengelola Bintal Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Non-Eselon dengan batas waktu yang telah ditentukan, secara berjenjang)

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini memiliki realisasi sebesar 100% dari 85% target yang ditetapkan di Triwulan IV sehingga capaian IKU ini sebesar 117.65%. Realisasi IKU ini pada Triwulan IV didasarkan pada ketepatan waktu penyampaian *longlist responden* Survei Penilaian Integritas Unit (SPIU). Apabila penyampaian daftar responden SPIU disampaikan sebelum s.d batas waktu yang ditentukan, maka realisasi yang dapat diakui adalah 100. Atas capaian ini, KPP Pratama Surabaya Krembangan mendapat indikator hijau.

9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

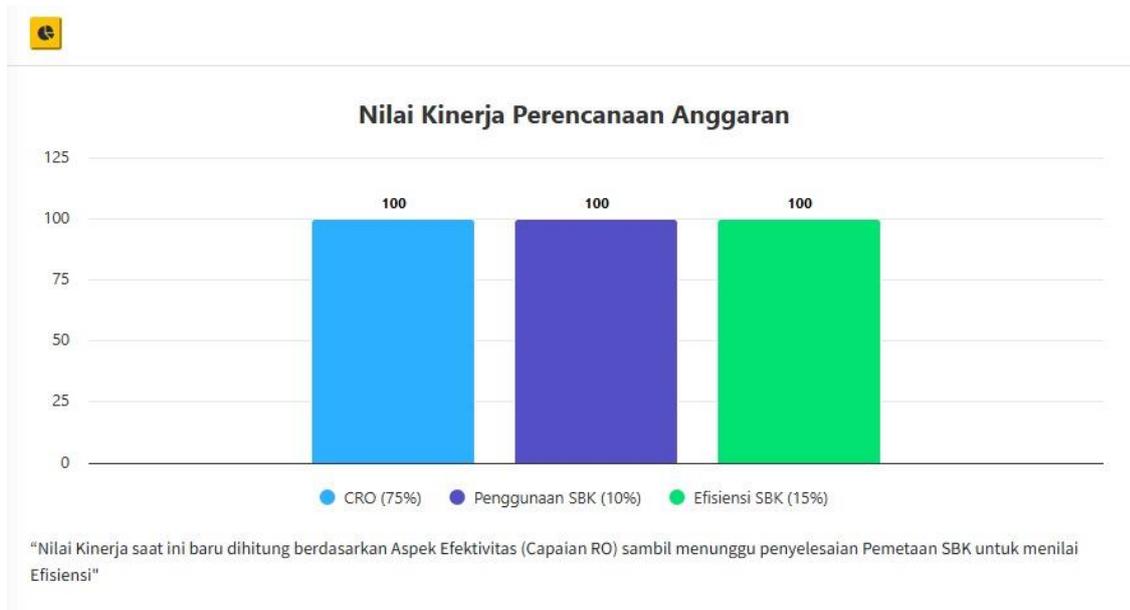
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko telah terealisasi sebesar 100,00% dari target 90,00% sehingga capaian IKU sebesar 111.11%. Atas capaian ini, KPP Pratama Surabaya Krembangan mendapat indikator hijau.

10. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 terealisasi sebesar 120,00 dari 100,00. Realisasi ini dihitung dari Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA).

Tabel 7 Indikator Pelaksanaan Anggaran



Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Tampilkan 25 entri Download Excel

Car:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	111046	SANTOR PELAKSANAAN PILAK PRATAMA SURABAYA KEBUMANGKAR	100,00	99,87	99,94

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan Tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan tahun 2024 sebesar Rp1.325.621.907.349 atau tercapai 100.12% dari target sebesar Rp1.324.052.491.000. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kontribusi pelaksanaan seluruh kegiatan yang berjalan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan Tahun 2024 dan sebagai panduan pelaksanaan tugas di tahun 2024.

LAMPIRAN

1. Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Surabaya Krembangan

